

BAB II

'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-yu'rifu. Sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan, si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya, maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.¹

Sedangkan kata 'urf secara terminologi, berarti sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang serta dijalani secara terus-menerus, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.²

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-'Adah (kebiasaan), yaitu:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."³

Kata al-'Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al-

¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

² Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

³ Ahmad Fahmi Abu-Sunnah, Al-'urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha (Kairo: Dar al-Basir, 2004), 31.

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 'urf terdiri dari dua bentuk yaitu, 'urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orangtuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan 'urf al-fi'li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli mu'atah (بيع المعاطاه).⁷

2. Dasar Hukum 'Urf

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 391.

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan 'urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Maidah (5) ayat 6:

مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Q.S al-Maidah (5) : 6)⁸

Ma>yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min hāraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam shara' maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah SWT Maha kaya dan Maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemanfaatan bagi hambanya.⁹

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Q.S al-Hajj (22) : 78)¹⁰

Al-Haraj pada ayat tersebut berarti kesempitan. Dalam hadits Nabi dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 108.

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi>Tafsir>al-Maraghi>Juz 6 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi>1946) 64-65.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 341.

Karena syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, apabila adat istiadat itu terus dilakukan sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Dengan kata lain melawan dan tidak sesuai dengan 'urf yang sah (adalah suatu kesempitan dalam agama, dan itu bertentangan dengan ayat di atas.'

Dari berbagai kasus 'urf yang terjadi, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya yang paling mendasar yaitu:¹¹

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat."

"Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat."

"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas{(ayat dan atau hadits)."¹²

[illegible]

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210.

4. Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan 'urf sah sebagai salah satu dalil syara' dan menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.²⁰ Menurut hasil penelitian al-Tayyid Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rincinya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Swt. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-Mudharabah). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.²⁶

5. Syarat 'Urf menjadi Landasan Hukum

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 156.

- e. 'Urf membawa maslahat dan tidak membawa mudarat. Setiap 'urf yang diterima oleh Islam adalah yang membawa maslahat bagi manusia pada umumnya. Sebaliknya setiap kebiasaan mendatangkan mudarat tidak boleh dilaksanakan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

"Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". HR. Ibnu Majah dan al-Daruguthny.²⁸

- d. Kebiasaan tersebut tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

'Urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedangkan ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Hukum yang didasarkan ijma' sama kuatnya dengan hukum

²⁸ Muhammad Al-Zuhayli, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatuhā fil-Madhab al-Arba'ah* (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 199.

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nass (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil shara' lainnya. Para ahli ushul fiqh memerincikannya sebagai berikut:

Apabila pertentangan 'urf dengan nass{{khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nass{{ maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Maka 'urf yang semacam ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.³¹

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa', apabila 'urf telah ada ketika datangnya nas{ yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf

30 Ibid.

[illegible]

Apabila 'urf yang ada ketika datangnya nass yang bersifat umum itu adalah 'urf al-'amali maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila 'urf al-'amali itu bersifat umum, maka 'urf tersebut mengkhususkan hukum nass yang umum, karena pengkhususan nass tersebut tidak membuat nass itu tidak dapat diamalkan. Akan tetapi Imam al-Qarafi berpendapat bahwa 'urf seperti ini tidak dapat dikhususkan hukum umum yang dikandung nass tersebut.³²

- Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nass yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat bahwa 'urf seperti ini, baik bersifat lafz maupun 'amali tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Karena

[illegible]

seakan-akan 'urf itu membatalkan nass³³ sedangkan 'urf tidak boleh membatalkan nass³³

B. 'Urf dalam Konteks Kepemilikan

Islam adalah agama yang fleksibel dan relevan di semua jaman dan waktu, termasuk dalam konsep kepemilikan, Islam sangat menekankan konsep harmonisasi antara hak kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum merupakan harta yang dimiliki oleh orang banyak, seperti jalan raya, laut, samudera, dan sungai besar, sedangkan kepemilikan khusus merupakan suatu harta yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, seperti rumah, mobil, pakaian, dan sawah. Pada hakikatnya manusia secara fitrah mempunyai motifasi atau keinginan untuk memiliki sesuatu, dan Islam sangat menghargai hal tersebut.

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.³⁴

Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya dan tidak

³³ Ibid.

³⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 58.

a. Ihrazul Mubahat

Ihrazul Mubahat merupakan penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang. Jadi kaitannya 'urf disini cara untuk mendapatkan suatu kepemilikan bisa melalui ihrazul mubahat, dan kebiasaan untuk mendapatkan suatu kepemilikan seperti ini sudah sangat sering dilakukan oleh orang-orang, seperti seseorang menangkap ikan dengan jaring baik di sungai maupun di laut, maka ikan yang terjaring tersebut sudah menjadi hak si pemilik jaring dan orang lain tidak berhak lagi mengambil ikan yang terjaring tersebut.³⁶

- 1) Benda mubahat belum di ikhrazkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di ikhrazkan orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz. Misalnya, seorang

³⁶ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 1* (Solo: Pustaka Mandiri, 2014), 99.

Khalafiyah yaitu melalui peninggalan seseorang, seperti warisan dan wasiat. Kaitannya dengan 'urf, metode untuk mendapatkan suatu kepemilikan melalui khalafiyah sudah pasti dilakukan dan berlangsung dalam setiap keluarga, karena setiap manusia tidak ada yang kekal dalam dunia ini, harta kepemilikannya pasti berpindah melalui sebab warisan dan wasiat, tetapi harta itu bisa dimiliki setelah orang yang berwasiat atau yang punya warisan meninggal dunia terlebih dahulu.

- 1) Khalafiyah syakhsyi 'an syakhsy (seseorang terhadap seseorang) adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang di pewaris. Misalnya Ali menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga seluruh hak-hak ayahnya berpindah kepada Ali, termasuk hak kepemilikan. Khalafiyah seperti ini juga disebut khalafiyah irs (waris), karena umumnya, sering terjadi pada waris, yaitu hak kepemilikan harta semula atas pewaris lalu digantikan oleh ahli waris.

[illegible]

2) Khalafiyah syai'an 'an syai'in (sesuatu terhadap sesuatu) adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta/barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Misalnya seseorang meminjamkan suatu barang setelah dikembalikan kepadanya, ternyata ada bagian dari barang itu yang rusak. Maka dibenarkan untuk meminta ganti dari kerusakan dari barang tersebut, karena memang menjadi hak miliknya. Khalafiyah seperti ini juga disebut khalafiyah ta'wid (menjamin kerusakan).³⁸

c. Al-'Uqud

Al-'Uqud (akad) yaitu melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, jadi kaitannya dengan 'urf, kebiasaan seseorang dalam melakukan suatu transaksi seperti jual beli, hibah dan wakaf itu juga bisa dikatakan sebagai sebab memiliki suatu kepemilikan dalam suatu harta.

Namun tidak hanya 'urf seperti itu saja yang bisa menjadi sebab dari suatu kepemilikan, terdapat dua 'urf dalam transaksi yang juga bisa menjadi sebab dalam suatu kepemilikan, yaitu:

1) 'Uqud jabariah

Akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan pada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berutang secara paksa.

2) Istimlak untuk maslahat umum

³⁸ Ibid., 38-39.

Misalnya, tanah-tanah disamping masjid apabila diperlukan untuk masjid harus dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya.

d. At-Tawallud mim Mamluk

At-Tawallud mim mamluk adalah hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak), Misalnya, seseorang memiliki pohon yang menghasilkan buah, buah ini otomatis menjadi milik bagi pemilik pohon, dan contoh lain misalnya seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.³⁹

'Urf untuk mendapatkan suatu kepemilikan melalui sebab semacam ini sudah pasti dimengerti oleh semua orang, karena semua orang sudah secara otomatis menerapkan dan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan sebuah kepemilikan. Bahkan 'urf sebab kepemilikan seperti ini digunakan orang-orang untuk berbisnis dan mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut.

Hikmah 'urf dalam memperoleh kepemilikan suatu barang melalui sebab-sebab dan cara-cara kepemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

- 1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- 2) Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.

³⁹ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 1...*, 100-101.

- ⁴⁰ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 50.